Research Article

Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia

Hasnidar Yuslin*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Article history:

Submission August 2021

Revised October 2021

Accepted November 2021

*Corresponding author:

E-mail:

hasnidaryuslin@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to prove the Gender Mainstreaming strategy which is analyzed from the achievements of the Gender Empowerment Index from 2010 to 2020. To prove the Gender Mainstreaming strategy, the author uses an index measurement approach from the indicators forming the Gender Empowerment Index which is then analyzed descriptively. It was found that the implementation of the Gender Mainstreaming strategy in Indonesia has not been optimal. The average achievement of the gender empowerment index from 2010 to 2020 was 71.39, which is still far from the perfect ratio of 100. Judging from its forming indicators, it was found that the representation of women in parliament from 2010 to 2020 was still below 30 percent, then women as the professional workforce are still growing at 40 percent which has not yet reached the 50 percent equality level, and the contribution of women's income has experienced an increasing trend which reflects that women have been included in the workforce, but the increase has been slow.

Kata Kunci: *Gender Mainstreaming (PuG), Gender Empowerment Index.*

Pendahuluan

Isu kesetaraan menjadi salah satu tujuan dari delapan tujuan global negara-negara yang berkomitmen dalam MDGs (*Millenium Development Goals*) dalam pembangunan ekonomi. Salah satu hal mendasar dalam kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat adalah kesetaraan yang mengindikasikan seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan, tanpa terkecuali (Hidayah, 2020). Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan manusia Indonesia yaitu mencapai kesetaraan gender untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, karenanya pembangunan berwawasan gender penting untuk memberikan kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional (Said, 2016).

Pemerintah Indonesia salah satu negara yang ikut berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender yang dibuktikan dengan

How to cite:

Yuslin, H. (2021). Pembuktian Strategi Pengarusutamaan (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*. 1 (3), 162 – 170. doi: 10.11594/jesi.01.03.04

diterbitkannya peraturan Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PuG) dalam pembangunan nasional. Hal tersebut dikarenakan perempuan Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat. Potensi yang dimiliki oleh perempuan tidak kalah dengan laki-laki, artinya bahwa jika kesempatan yang diberikan oleh perempuan semakin banyak untuk turut andil dalam pembangunan maka akan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia (Dini et al., 2020).

Strategi kebijakan tersebut mengikutsertakan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Kemudian tahun 2015-2019 tentang RPJMN dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 menetapkan bahwa selain dari *Sustainable Development* dan *Good Governance* menjadi amanah seluruh pejabat negara, PuG juga menjadi strategi lintas bidang dalam pembangunan bagi seluruh pejabat negara termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh wilayah Indonesia, (Sitorus, 2016).

Pengarusutamaan Gender (PuG), secara operasional dapat diartikan sebagai suatu pembangunan nasional yang berperspektif gender. Pengarusutamaan gender akan berdampak maksimal dalam kesetaraan apabila dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat, baik yang tergabung dalam lembaga pemerintah, swasta seperti organisasi sosial, organisasi politik, organisasi sosial, organisasi keagamaan dan lain-lain hingga pada unit terkecil yaitu keluarga. Pengarusutamaan Gender (PuG) dijadikan sebagai suatu strategi bukanlah suatu kegiatan atau program, strategi yang dibangun mengikutsertakan gender menjadi dimensi dalam mencapai pembangunan yang berkeadilan gender sebagaimana Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PuG) dalam pembangunan nasional (KPPPA, 2020).

Tujuannya ialah memastikan seluruh kebijakan, kegiatan atau program telah adil, setara antara laki-laki, perempuan, lansia, anak penyandang disabilitas dan kelompok yang lainnya, misalnya pembangunan di bidang

ekonomi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi apabila telah berwawasan gender, maka dapat dipastikan bahwa dalam partisipasi aktivitas ekonomi antara perempuan maupun laki-laki dapat dinikmati tanpa adanya perbedaan atau ketimpangan (Tupamahu, 2020).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pengarusutamaan gender bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program evaluasi. Untuk melihat tingkat perkembangan dari kebijakan pengarusutamaan gender tersebut dapat diukur dengan pengukuran diukur melalui Indeks Komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dibangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. (UNDP, 1995).

Untuk melihat sejauh mana implementasi strategi PuG diukur melalui Indeks Komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDP) yang dibangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan peranan gender pada bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan (Alfiana, 2015). Kesetaraan dan keadilan gender diartikan sebagai kondisi dimana siklus dan porsi laki-laki dan perempuan yang serasi, setara, seimbang dan harmonis. Makna yang dimaksud dalam kesetaraan gender bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status atau kedudukan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih pada persoalan pencapaian peran, peran yang dimaksud ialah perempuan memiliki peranan yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintah, pengambilan keputusan di bidang politik dan aktivitas ekonomi khususnya peran perempuan dalam pendapatan rumah tangga (Dini et al., 2020).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dilihat dari tiga komponen pembentuknya yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG ini melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, ekonomi dan pengambilan keputusan (Wisnujati, n.d.). Urgensi dalam pemberdayaan perempuan menjadi

kan sebagai analisis kontribusi perempuan dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas yang nantinya akan berpengaruh

secara langsung pada keberhasilan pembangunan manusia.

Tabel 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponennya di Indonesia Tahun 2010-2020

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2010	17.49	44.02	33.50	68.15
2011	18.04	45.75	34.16	69.14
2012	17.49	45.22	34.70	70.07
2013	17.32	44.82	35.17	70.46
2014	18.04	45.61	35.64	70.68
2015	17.32	46.03	36.03	70.83
2016	17.32	47.59	36.42	71.39
2017	17.32	46.31	36.62	71.74
2018	17.32	46.49	36.70	72.10
2019	20.52	47.46	37.10	75.24
2020	21.09	48.76	37.26	75.57

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Februari 2021

Berdasarkan data pada tabel 1, Secara umum IDG Indonesia menunjukkan tren meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2018 namun lamban. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 3,14 poin atau sebesar 4,35 persen, tapi mengalami penurunan pada tahun 2020. Tabel diatas menunjukkan pemberdayaan perempuan mengalami peningkatan meskipun lambat. Dari indikator komponennya, menunjukkan pemberdayaan gender disebabkan adanya peningkatan yang signifikan pada keterlibatan perempuan dalam parlemen pada tahun 2019, kemudian kenaikan persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada tahun 2019 sebesar 47,46 dari 46,47 dan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 48,76. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa pemberdayaan gender di Indonesia dari tahun 2010-2020 mengalami kemajuan meskipun lambat.

Berangkat dari uraian diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai implementasi strategi Pengarusutamaan Gender (PuG) yang dianalisis dari capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2010-2020.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang diunduh dari situs resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, dengan kurun waktu dari tahun 2010-2020 yang terdiri dari data capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari ketiga komponen pembentuknya yaitu: keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Capaian Indeks pemberdayaan gender menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur strategi Pengarusutamaan Gender. Urgensi pemberdayaan perempuan sebagai landasan analisis dalam melihat partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi (Dini et al., 2020).

Peneliti menggunakan analisa statistik deskriptif dan regresi linear berganda dalam pengolahan data. Analisa statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah tersaji sehingga lebih mudah untuk dipahami (Sugiyono, 2017) yang meliputi data rata-rata (mean), deviasi, varians, standar deviasi, rentang, jumlah (sum) dan nilai minimum maksimum dari data (Nazir, 2015). Sedangkan regresi linear berganda digunakan untuk

melihat kontribusi dari ketiga indikator pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Hasil dan Pembahasan

Mengukur keberhasilan strategi Pengarusutamaan Gender (PuG), penting menjadikan pemberdayaan gender sebagai salah satu indikator. Landasan analisis ini berdasar pada kontribusi perempuan terhadap produk-

tivitas sumber daya manusia, dimana peningkatan sumber daya manusia perempuan akan berpengaruh langsung pada keberhasilan pembangunan. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender didapat dari capaian tiga komponen pembentuknya yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan (Karyono, Y, et al., 2019).

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Dimensi	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Indeks Pemberdayaan Gender	11	68.15	75.57	71.39	2.28
Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	11	17.32	21.09	18.12	1.36
Perempuan sebagai Tenaga Profesional	11	44.02	48.76	46.18	1.35
Sumbangan Pendapatan Perempuan	11	33.50	37.26	35.75	1.24
Valid N (listwise)	11				

Sumber: data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa N merupakan jumlah periode setiap indikator yang valid sebanyak 11. Tabel di atas, mengindikasikan indeks pemberdayaan gender dengan nilai minimum sebesar 68,15, nilai maksimum 75,57 dari periode 2010-2020, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 71,39 lebih besar dari nilai standar deviasinya 2,28, artinya indeks pemberdayaan gender berdampak baik dijadikan tolak ukur pembuktian pengimplementasian kebijakan pengarusutamaan gender.

Indikator keterlibatan perempuan dalam parlemen, nilai minimumnya sebesar 17,32, nilai maksimumnya sebesar 21,09, dari periode 2010-2010, dengan nilai *mean* sebesar 18,12 lebih besar dari nilai standar deviasinya sebesar 1,36, artinya keterlibatan perempuan

dalam parlemen berdampak baik dalam pemberdayaan gender.

Indikator perempuan sebagai tenaga profesional dengan nilai minimum sebesar 44,02, nilai maksimum sebesar 48,76 dari periode waktu 2010-2020, dengan nilai *mean* sebesar 46,18 lebih besar dari nilai standar deviasinya sebesar 1,35, artinya perempuan sebagai tenaga profesional berdampak baik dalam pemberdayaan gender.

Indikator sumbangan pendapatan perempuan dengan nilai minimum sebesar 33,50, nilai maksimumnya sebesar 37,26, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 35,75 lebih besar dari nilai standar deviasinya sebesar 1,24, yang berarti sumbangan pendapatan perempuan berdampak baik dalam pemberdayaan gender.

Gambar 1. Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia Tahun 2010-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021

Pemberdayaan gender dapat tercapai dengan angka rasio sempurna, ketika keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor sama dengan laki-laki salah satunya dalam berpolitik. Dengan tercapainya kesetaraan dalam sektor politik diharapkan agar tidak ada lagi kebijakan yang bias gender, namun pada realitasnya sektor politik di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Hal tersebut tercermin pada tabel 1.1 yang menunjukkan angka rata-rata keterlibatan perempuan pada tahun 2010 hingga tahun 2020 hanya berkisar sebesar 18,12 persen, angka ini masih jauh dari kuota keterwakilan perempuan dalam parlemen sebesar 30 persen.

Hasil pemilu di Indonesia sepanjang sejarah pemilu keterlibatan perempuan dalam parlemen sangat sedikit. Terlihat pada gambar 1 kurun waktu sebelas tahun terakhir angka capaian keterlibatan perempuan dalam parlemen tidak terlalu agresif yaitu 17.49 persen pada tahun 2010 dan 21.09 persen pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor sistem politik, budaya, media dan perempuan itu sendiri. Kondisi yang terjadi yang disebabkan oleh faktor budaya yaitu budaya patriarkhi yang tumbuh di Indonesia yang masih erat, dimana Indonesia masih memposisikan laki-laki sebagai icon dalam politik (KPPPA, 2020). Pada sistem partai dalam setiap pengambilan keputusan masih mengabaikan gender sehingga dukungan partai kepada perempuan masih rendah, akibatnya pendidikan publik yang digiring oleh media semakin melemahkan representasi perempuan yang belum maksimal sehingga akan berdampak pada pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memilih perempuan untuk duduk dalam kursi parlemen karena pemberitaan yang masih tidak menguatkan keterpihakan perempuan dalam keterwakilan di parlemen (Parawansa, 2002) dan faktor yang lain ialah dari perempuan itu sendiri yang masih ragu untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai anggota dewan karena adanya kekhawatiran terjebak pada tindakan yang melanggar hukum serta melanggar moralitas (Umagapi, 2020).

Keterwakilan perempuan sebagai anggota dewan memang tidak secara signifikan memberikan dampak kebijakan yang sensitifitas

gender, hal ini disebabkan karena dalam pengambilan keputusan terkadang dipengaruhi oleh faktor kekuatan kuantitas. Meskipun pada tahun 2019 hingga 2020 keterwakilan perempuan dalam parlemen mengalami peningkatan, akan tetapi kebijakan-kebijakan yang tercipta belum tentu menjamin kebijakan yang pro perempuan, hal demikian juga disebabkan oleh posisi perempuan yang terlibat dalam kursi parlemen belum menempati posisi-posisi strategis, seperti menjadi ketua atau wakil ketua, dimana pada tahun 2019 pimpinan lembaga legislatif masih didominasi oleh laki-laki. Dari 19 posisi pimpinan yang ada, hanya dua orang perempuan yang menduduki jabatan pimpinan (KPPPA, 2020).

Implikasi dari analisis penelitian ini yaitu dengan melihat keterlibatan perempuan dalam parlemen sejak tahun 2010 hingga 2020 belum mencapai kuota, maka posisi perempuan dalam dunia parlemen masih perlu diperjuangkan, hal demikian menjadi penting karena posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik sangat memberikan peluang dalam pertimbangan suara, kepentingan dan kebutuhan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Aspirasi perempuan dapat terwakili dan menjadi landasan dalam penyusunan dan pembentukan kebijakan serta perundang-undangan yang berkadil gender (Dini, et. al., 2020).

Hal demikian sejalan dengan pernyataan dalam *United National Development Programme* (UNDP) yang menjelaskan bahwa Marginalisasi yang dialami perempuan dalam struktur partai berisiko semakin rendahnya keberhasilan perempuan dalam mempengaruhi agenda-agenda politik yang diusung oleh partai. Marginalisasi ini juga berdampak pada sulitnya kebijak-kebijakan yang mendorong upaya pembangunan dan pemberdayaan perempuan menjadi agenda prioritas (UNDP, 2015).

Kontruksi budaya telah membagi peran perempuan dan laki-laki, dimana perempuan yang duntut bertanggung jawab dalam ranah domestik, sedangkan laki-laki yang duntut dalam ranah publik. Pembagian ini justru merugikan kedua belah pihak baik pada laki-laki terutama untuk perempuan. Meskipun telah dilakukan sosialisasi untuk menyadarkan

kontruksi tersebut tidak sepenuhnya tepat, akan tetapi faktor internal kontruksi ini masih mempengaruhi pola berpikir kebanyakan laki-laki dan perempuan. Salah satu yang menjadi fakta dari kondisi ini ialah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan jenis kelamin, seperti perempuan harus memilih pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan ranah domestik, atau bahkan perempuan harusnya bekerja pada sektor informal daripada sektor formal (KPPPA, 2020).

Salah satu dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan ialah keterlibatan perempuan di sektor formal. Ketika perempuan telah berdaya dan mandiri, maka dengan sendirinya perempuan akan mampu meningkatkan kemampuannya serta membangun relasi dengan lingkungannya untuk lebih setara dalam pengambilan keputusan. Partisipasi aktif perempuan di sektor formal menunjukkan profesionalitas perempuan terhadap

pengakuan dunia kerja yang mampu meningkatkan pembangunan nasional, memperkuat kondisi perekonomian, serta mampu memperbaiki kualitas sumberdaya manusia baik diri perempuan, laki-laki maupun keluarga (Karyono, Y. et. al., 2019).

Komponen kedua yang digunakan dalam mengukur capaian indeks pemberdayaan gender ialah profesionalitas perempuan di sektor kerja formal. Pada gambar 1.2 menunjukkan capaian tertinggi perempuan sebagai tenaga profesional terjadi pada tahun 2016 sebesar 47,59 persen tahun 2019 sebesar 47,46 persen dan tahun 2020 sebesar 48,76 persen. Kesetaraan perempuan sebagai tenaga profesional terjadi ketika capaian yang diperoleh menyentuh angka 50 persen. Berdasarkan capaian pada tahun 2020 sebesar 48,76 persen, maka pemberdayaan gender masih perlu ditingkatkan pada bidang tenaga profesional sebesar 1,24 persen agar menyentuh angka kesetaraan laki-laki dengan perempuan.

Gambar 2. Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Indonesia Tahun 2010-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021

Gambar 2 menunjukkan tren yang lambat dari tahun 2010 hingga tahun 2020, akan tetapi dalam tiga tahun terakhir perempuan sebagai tenaga profesional terus mengalami peningkatan, meskipun masih berada di bawah angka 50 persen. Peningkatan ini mencerminkan bahwa profesionalitas perempuan semakin membaik.

Implikasi dari analisis penelitian ini ialah perempuan sebagai tenaga profesional harus terus diperhitungkan, karena perempuan sebagai tenaga profesional juga mampu berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Hal demikian sejalan dengan temuan penelitian oleh Nugrahini Susantinah Wisnujati yang menyatakan perempuan sebagai tenaga profesional dengan potensi yang dimiliki

mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta pendapatan nasional (Wisnujati, 2020).

Olehnya itu, strategi yang perlu dilakukan adalah memperkuat kesadaran dan analisa pejabat dalam pengarusutamaan gender seperti pembangunan yang berwawasan gender bagi seluruh pejabat negara di Indonesia, dan menguatkan strategi pengarusutamaan gender dalam siklus program baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga tahap evaluasi. Dengan demikian setiap program dan kebijakan yang disahkan menjadi program dan kebijakan yang responsif gender bukan program dan kebijakan yang bias gender (KPPA, 2020).

Gambar 3. Sumbangan Pendapatan Perempuan di Indonesia Tahun 2010-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021

Sumbangan pendapatan perempuan dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur capaian indeks pemberdayaan gender. Sumbangan pendapatan perempuan menjadi indikator kontribusi perempuan secara finansial yang merefleksikan kedudukan perempuan dalam dunia kerja dan juga mencerminkan kemandirian perempuan secara ekonomi (Rahmawati, 2018).

Gambar 3 menunjukkan capaian sumbangan pendapatan perempuan yang terus meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Meskipun capaian tersebut masih jauh dari laki-laki, akan tetapi capaian peningkatan ini menjadi indikator yang memberi arah positif akan terjadinya peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi. Sumbangan pendapatan perempuan yang terus mengalami peningkatan mengindikasikan kualitas tenaga

kerja perempuan semakin diperhitungkan dalam dunia kerja, akan tetapi peningkatannya lambat.

Implikasi dari analisis penelitian ini ialah melihat capaian sumbangan pendapatan perempuan dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan, akan tetapi masih berada dalam capaian rendah. Kondisi ini kerap kali disebabkan oleh ketidaksetaraan gender yang memperkuat ketimpangan di bidang ekonomi, olehnya itu diperkuat otonomi ekonomi untuk memperkuat keberdayaan seseorang. Otonomi ini dapat membuka akses terhadap adanya pilihan yang dapat digunakan untuk mendapatkan peluang yang berkualitas bagi kehidupan. Sebab sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu indikator yang merefleksikan keberhasilan pemberdayaan gender suatu wilayah (Rahmawati, 2018).

Gambar 4. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia Tahun 2010-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021

Pembuktian implementasi strategi pengarusutamaan gender dalam suatu pembangunan manusia, dapat dilihat dari capaian salah satu indikatornya yaitu indeks pemberdayaan gender suatu daerah/wilayah. Berdasarkan gambar 4, menunjukkan capaian indeks pemberdayaan gender pada tahun 2010

mengalami tren peningkatan dari 68.15 mencapai 74.57 pada tahun 2020. Melihat kondisi sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa pemberdayaan gender di Indonesia telah mengalami kemajuan meskipun lambat. Apabila dilihat pada tabel 1.1 nilai rata-rata capaian indeks pemberdayaan gender

sebelas tahun terakhir sebesar 71,39, angka ini masih jauh dari angka rasio sempurna yaitu 100. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi strategi pengarusutamaan gender di Indonesia belum optimal.

Implikasi dari analisis penelitian ialah sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PuG). Capaian indeks pemberdayaan gender sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 dan pasca Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 menjadikan strategi PuG dalam lintas bidang pembangunan, akan tetapi tren peningkatannya masih lambat. Olehnya itu, dibutuhkan komitmen bersama oleh semua pihak agar strategi

pengarusutamaan gender di Indonesia dapat terealisasi secara optimal guna untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai sektor.

Capaian indeks pemberdayaan gender dipengaruhi oleh tren peningkatan dari tiga komponen pembentuknya yang mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga tahun 2020. Dimana perempuan semakin menyadari bahwa pentingnya untuk berkiprah di ruang publik yang tentu diiringi dengan keterbukaan akses bagi perempuan itu sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi linear berganda pada tabel 3 mengenai kontribusi dari ketiga komponen pembentuk dari Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia.

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda

Komponen	Coefficient	t-statistik	Probabilitas
C	15.72366	3.927751	0.0057
KPP	0.879477	7.865586	0.0001
PTP	0.175757	0.928234	0.3842
SPP	1.338548	7.674970	0.0001

Sumber: Data diolah Eviews 10, 2021

Dari hasil regresi linear berganda, maka dirumuskan persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$IDG = C + KPP + PTP + SPP$$

$$IDG = 15,72366 + 0,879477 + 0,175757 + 1.338548$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dengan nilai konstanta sebesar 15,72366, artinya nilai IDG sebesar 15,72366. Nilai koefisien dari Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen (KPP) sebesar 0,879477 yang artinya setiap peningkatan satu persen keterwakilan perempuan dalam parlemen akan berkontribusi meningkatkan rasio Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 0,88. Nilai koefisien Perempuan sebagai Tenaga Profesional (PTP) sebesar 0,175757 yang artinya setiap satu persen perempuan sebagai tenaga profesional akan berkontribusi meningkatkan rasio Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 0,18. Nilai koefisien Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) sebesar 1.338548 yang artinya setiap peningkatan sumbangan pendapatan

perempuan akan berkontribusi meningkatkan rasio Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 1,34.

Hal demikian dapat dijelaskan bahwa tren peningkatan capaian dari Indeks Pemberdayaan Gender sangat dipengaruhi oleh tren peningkatan ketiga indikator pembentuknya yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian strategi pengarusutamaan gender di Indonesia belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari analisis statistik deskriptif yang menunjukkan rata-rata angka capaian indeks pemberdayaan gender dari tahun 2010 hingga tahun 2020 sebesar 71,39, angka tersebut masih jauh dari angka rasio sempurna yaitu 100, artinya pemberdayaan antara perempuan dan laki-laki belum sejalan dengan strategi pengarusutamaan gender. kondisi ini

juga tercermin pada indikator pembentuk indeks pemberdayaan gender yaitu: indikator keterwakilan perempuan dalam parlemen dari tahun 2010-2020 masih di bawah 30 persen. Indikator perempuan sebagai tenaga profesional masih tumbuh pada angka 40 persen, artinya angka ini belum menyentuh kesetaraan dengan laki-laki pada angka 50 persen. Selanjutnya sumbangan pendapatan perempuan menunjukkan tren peningkatan yang mengindikasikan bahwa perempuan semakin diperhitungkan dalam dunia kerja, akan tetapi peningkatannya lambat.

Dari hasil analisis tersebut, maka beberapa kebijakan yang harus dilakukan agar strategi pengarusutamaan gender dapat terimplementasi secara optimal yaitu: memperjelas regulasi yang mewajibkan pemberdayaan perempuan dicantumkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, sistem dalam pemilu yang awalnya sistem keterwakilan calon diubah menjadi sistem proporsional tertutup dengan mewajibkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan guna untuk meningkatkan kualitas perempuan dalam dunia kerja, menghapus segala bentuk diskriminasi upah dalam pekerjaan dengan melakukan perumusan kebijakan yang responsif gender serta perlindungan hukum bagi angkatan kerja perempuan.

Lebih lanjut, semoga penelitian ini dapat menambah literatur tentang pemberdayaan gender di Indonesia serta membuka wawasan bahwa pemberdayaan gender memiliki dampak positif terhadap kinerja perekonomian, kinerja pembangunan manusia baik secara nasional, regional maupun lokal.

Daftar Pustaka

- Alfiana, M. A. F. dkk. (2015). Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Indonesia. In *Seminar Geografi UMS*.
- Dini, I. M., Fajriyah, Mahdiah, Y., Fahmadia, E., & Lukitasari, I. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Publikasi Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id.
- Hidayah, Z. M. F. R. (2020). Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), 110. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13919>
- Karyono, Y. dkk (2019). Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender 2018. From Publikasi Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id
- KPPPA. (2020). *Pengarusutamaan Gender adalah Strategi Integrasi Gender Bukan suatu Program atau Kegiatan*. <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2020/07/16/pen-agrusutamaan-gender-adalah-strategi-integrasi-gender-bukan-suatu-program-atau-kegiatan/>
- Nazir, M. (2015). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Parawansa, K.I. (2002). Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah. *International IDEA*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
- Rahmawati, D. N, dkk. (2018). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Kemen PPPA dan BPS.
- Said, A. S. A. dkk. (2016). *Statistik Gender Tematik: Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi, Kemitrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- Sitorus, A. V. Y. (2016). Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Sosio Informa*, 89-101. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i1.190>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Tupamahu, M. K. (2020). Perempuan dalam pembangunan berwawasan gender : sebuah kajian dalam perspektif fenomenologis. *Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 2(05), 128-134.
- Umagi, J. L. (2020). Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. 25(1). 19-34.
- UNDP. (1995). Human Development Report 1994. In *American Journal of Economics and Sociology* (Vol. 54, Issue 1). <https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.1995.tb02630.x>
- UNDP. (2015). *Gender Equality in Human Development-Measurement Revisited*.
- Wisnujati, N. S. (n.d.). *Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro*. 20(2), 67-81.